



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM
MATERIIL
PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI
PIDANA BAGI
PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

SKRIPSI



**NADIA ANDHITA
05 140 241**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

*Allah memberikan ilmu yang berguna kepada siapa yang dia kehendaki,
Barang siapa yang mendapatkan ilmu,
Sesungguhnya telah mendapatkan karunia yang banyak,
Dan tak ada dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal
(Al Baqarah : 269)*

*Saya memohon kekuatan dan Tuhan memberi saya kesulitan –kesulitan
untuk membuat saya kuat.*

*Saya memohon kebijakan dan Tuhan memberi saya persoalan
untuk diselesaikan.*

*Saya memohon kemakmuran dan Tuhan memberi saya otak dan tenaga
untuk bekerja.*

*Saya memohon keteguhan hati dan Tuhan memberi saya bahaya
untuk diatasi.*

*Saya memohon cinta dan Tuhan memberi saya orang-orang bermasalah
untuk ditolong.*

*Saya memohon kemurahan/kebaikan hati dan Tuhan memberi
saya kesempatan-kesempatan.*

*Saya tidak memperoleh yang saya inginkan, saya mendapatkan
segala yang saya butuhkan.*

*Bukan kesulitan yang membuat kita takut,
Tapi ketakutan yang membuat kita sulit.
Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah,
Jangan pernah menyerah untuk mencoba,
Jangan katakan pada Allah aku mempunyai masalah yang besar,
Tapi katakanlah kepada masalah bahwa aku punya Allah yang Maha Besar
(Ali bin Abi Tholib)*

*Ya Allah.....sembah sujudku dihadapan Mu
Karya ini kupersembahkan khusus untuk kedua orang tuaku tercinta
Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu selama ini dan selamanya
Terimalah sepenggal keberhasilan ini sebagai tanda baktiku padamu...
Sebagai buah dari doamu...sebagai mutiara disetiap nasihatmu...
Dan sebagai permata dari setiap tetes air matamu....*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selanjutnya penulis juga menyampaikan shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperbaiki akhlak manusia dan meninggalkan mukjizat Al Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup dan sumber ilmu pengetahuan bagi seluruh umatnya.

Terima kasih yang sangat mendalam penulis sampaikan kepada ayahanda Idris Effendi dan Ibunda Soraya Hasan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kesabaran, dengan kasih sayang dan tanpa ada rasa lelah, membimbing dan memberikan dorongan moril maupun materil serta senantiasa mengiringi dengan doa yang tulus.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta masukan baik dari bapak dan ibu dosen serta dari teman-teman penulis. Untuk itu sepatutnyalah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang

10. Ibu DRA. Hj. Ermianti N. selaku Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, Bapak DRS. ABD. Hakim, M.HI selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang dan Ibu Yelti Mulfi, BA selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klas I A Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta pengetahuan kepada penulis.
11. Untuk kakakku Dian Amalia dan adikku Aulia Rizqan yang telah memberikan masukan dan solusi serta memberikan petunjuk-petunjuk berharga yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 yang membantu memberikan masukan, semangat dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik itu dari segi tata bahasa, teknik penulisannya, serta bobot ilmiahnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang dapat membangun demi untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
1. Pengertian Perkawinan dan Pengaturannya	18
1.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .	22
1.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat	24
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan	28
3. Syarat Sah Perkawinan	32

3.1 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam	32
3.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	35
4. Asas Perkawinan	38
4.1 Asas Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	38
4.2 Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	41
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (PERKAWINAN SIRRI)	
1. Pengertian Perkawinan Sirri dan Pengaturannya.....	44
1.1 Pengertian Perkawinan Sirri.....	44
1.2 Pengaturan Perkawinan Sirri	48
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri.....	49
3. Tindak Pidana Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.....	53
4. Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Secara Umum .	56
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	64

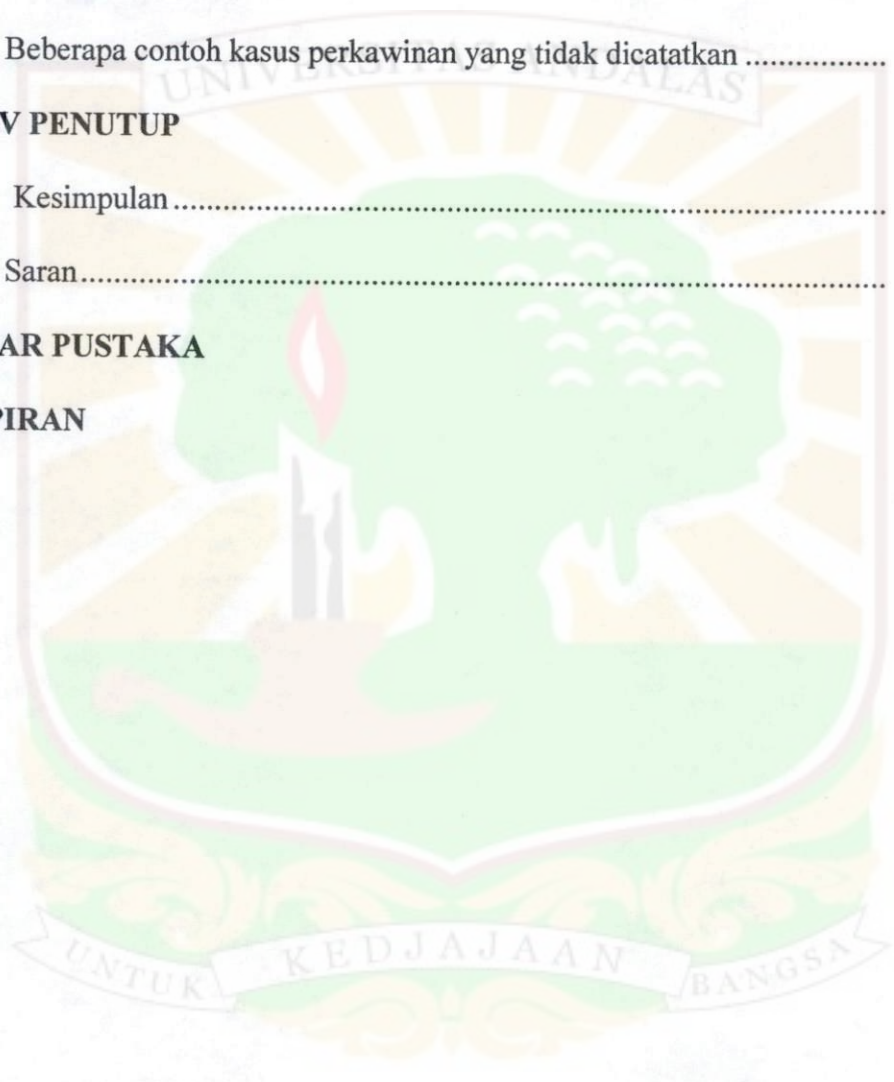
B. Sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan	69
C. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan	87
D. Beberapa contoh kasus perkawinan yang tidak dicatatkan	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai masyarakat hukum yang terbentuk karena adanya suatu susunan kekeluargaan yang ditentukan oleh sifat geneologis. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itulah manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk meneruskan kelangsungan bagian masyarakat, karena perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan keturunan.

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini adalah untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai. Sebutan suci adalah untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu.¹

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hal 47

Bagi suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional. Karena pelaksanaan perkawinan selain didasarkan pada hukum agama, juga didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini bertujuan untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini, maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni berlakunya satu Undang-Undang bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal mereka melangsungkan perkawinan. Sebab perkawinan bukan saja sebagai urusan pribadi, keluarga, atau masyarakat dalam suatu lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan pengertian dari perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Hal ini mengungkapkan adanya hubungan hukum seorang pria dengan seorang wanita hidup bersama sebagai suami isteri,

ikatan batin ialah suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan perkawinan yang sah telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, dewasa ini banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Pada dasarnya, istilah nikah sirri tidak dikenal dalam hukum negara. Hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan.² Nikah sirri merupakan istilah yang berkembang di masyarakat terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

Siri merupakan istilah Arab "sirri", yang berarti rahasia atau sembunyi. Masyarakat awam melihat pernikahan ini sebagai ritual pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Secara sederhana, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah setiap pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mendapatkan surat nikah meskipun secara syariat dinyatakan sah.³ Biasanya nikah sirri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja.

² Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, tanggal 13 Oktober 2011

³ www.multiply.com, *Nikah sirri vs Nikah islam*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

Nikah sirri dikenal muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan di institusi pemerintah. UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, untuk perkawinan bagi beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang beragama di luar Islam dicatat di kantor catatan sipil.

Walaupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diberlakukan, namun praktik nikah sirri yang melanggar undang-undang ini terus saja berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat agama dan catatan hukum. Sementara pernikahan sirri hanya memenuhi salah satu jenis persyaratan, yaitu syarat agama. Jadi secara hukum negara perkawinan ini belum bisa dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Karena perkawinannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Sampai saat sekarang, masih banyak para ulama yang berbeda pendapat mengenai keabsahan dari pernikahan sirri ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan sirri itu sah. Nikah sirri dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Karena pernikahan siri ini dilakukan dengan memenuhi syarat nikah, rukun nikah, dan ada wali pernikahan. Namun, pernikahan ini belum dicatat di pengadilan sehingga tidak memiliki akta perkawinan. Sebenarnya akta perkawinan bukanlah hal yang menentukan sah atau

tidaknya pernikahan, melainkan hanya sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa pernikahan sirri itu tidak sah. Para ulama yang menentang praktik nikah sirri ini menyatakan bahwa pada umumnya pelaku nikah sirri menempuh cara tersebut karena pernikahannya tak ingin diketahui orang banyak. Padahal dalam pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain diketahui orang banyak. Hal ini disebabkan agar nantinya tidak timbul fitnah di kalangan masyarakat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat, pemberitahuan (i'lan) adalah syarat sahnya nikah. Para ulama ini berpendapat bahwa nikah sirri sama dengan perzinahan terselubung. Oleh karenanya, dalam hukum negara Indonesia, perkawinan harus tercatat di KUA.⁴

Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam. Menurut syaria Islam, pernikahan itu sah apabila memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam. Syarat ini dibenarkan oleh semua mazhab dalam Islam, mulai mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali.⁵ Dalam

⁴ www.jakartapress.com, *Draf RUU HMPAP Dorong Timbulnya Anak Tanpa Ayah* oleh Arief Turatno, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

⁵ www.antaranews.com, *Kontroversi Pidana Pelaku Nikah Siri* oleh Edy Supriatna Sjafei, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

Islam, dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan. Nikah sirri ada dua bentuk, yaitu nikah sirri yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan nikah sirri yang tidak sah, karena rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak terpenuhi.

Pada dasarnya, hak dan kewajiban pelaku perkawinan sirri sama dengan perkawinan yang dilakukan di depan petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Suami tetap wajib memberikan penghidupan kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Suami juga wajib memberikan hak waris kepada anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Besarnya sama dengan hak waris yang diberikan kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat di administrasi negara. Akan tetapi, memang masih ada suami nikah sirri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anaknya. Pelaku nikah sirri, terutama laki-laki lebih memilih untuk melakukan praktek nikah sirri ini, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tidak memiliki kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan ini, suami dengan mudah melepaskan tanggungjawabnya terhadap istri dan anaknya. Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA (pernikahan sirri) merupakan perkawinan sah, dimana mereka tetap terikat sebagai suami istri yang sah, tetap tercipta hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya dan suami tetap harus menjalankan kewajibannya terhadap istri dan anaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung persoalan pernikahan sirri, hanya mewajibkan pencatatan pernikahan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini berkeinginan dan berupaya untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri. Keinginan pemerintah tersebut, kini telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 143-153. Berkenaan dengan nikah sirri, dalam Pasal 143 Rancangan Undang-Undang ini, pernikahan siri dianggap perbuatan illegal. Pelakunya akan diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi penghulu yang menikahkannya, yaitu sanksi pidana 3 tahun penjara.

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama ini bukan merupakan revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974. RUU ini tujuannya adalah untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini mengatur pernikahan untuk orang yang beragama Islam. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Namun, langkah pemerintah dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang ini menuai banyak protes. Banyak timbul kontroversi diantara para ulama, masyarakat, dan praktisi hukum, terutama menyangkut perlu tidaknya sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri. Ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra dengan aturan tersebut. Masing-masing pihak mempertentangkan logika hukum dan logika agama.

Pihak yang pro Rancangan Undang-Undang ini sependapat apabila pelaku pernikahan sirri dipidanakan. Pernikahan sirri ini bisa merugikan istri dan anak-anak yang dilahirkan. Dan pernikahan ini akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Jadi dengan adanya sanksi pidana ini, maka hak-hak anak maupun istri terlindungi dan akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam suatu perkawinan. Kementerian Agama mencatat, 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat. Artinya, 35 juta anak di Indonesia sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya. Selain itu, dari dua juta perkawinan per tahun, terdapat 200 ribu perceraian. Jadi dengan adanya kewajiban pencatatan perkawinan ini, juga sebagai upaya untuk meminimalkan angka perceraian. Yang sepakat dengan adanya sanksi yang dikenakan pada pelaku pernikahan sirri ini menyatakan bahwa pelaku nikah sirri ini layak dikenakan sanksi, tapi bukan karena melakukan pernikahannya, melainkan karena tidak memenuhi syarat administratif atau legalitas hukum.⁶

⁶ www.hariansumutpos.com, *Sanksi Hukum Menanti Pelaku Nikah Siri*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

Sedangkan pihak yang kontra dengan Rancangan Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri bertentangan dengan syariah dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pihak yang kontra menyatakan bahwa pernikahan sirri tersebut akad nikahnya sudah sesuai dengan ketentuan agama islam, walaupun tidak tercatat di KUA atas nama negara. Mereka berpendapat bahwa pelarangan nikah sirri melanggar HAM. Mereka beranggapan tidak realistis pelaku nikah sirri dipidana ketika seks bebas dan perzinahan yang nyata-nyata melanggar norma-norma agama dan sosial malah dianggap bagian HAM dan tidak diberi sanksi. Menurut mereka jika memang alasan disusunnya RUU Perkawinan ini adalah untuk melindungi anak-anak dan istri yang dirugikan, maka orang yang berzinah juga harus dihukum, karena anak-anak dari nikah sirri maupun berzina sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum. Karena alasan inilah mereka beranggapan bahwa alasan pengukuman ini tidak logis, sehingga mereka menentang RUU ini.⁷

Dari perbedaan pendapat antar kelompok ini, sesungguhnya yang menjadi perdebatan adalah perlu tidaknya sanksi pidana diterapkan sebagai upaya preventif agar pernikahan sirri dapat dihindarkan. Perlu dilihat terlebih dahulu aspek hukum pelanggaran pidana yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang berkaitan dengan pernikahan sirri ini dan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasan dalam hal

⁷ www.antaranews.com, *Kontroversi Pidana Pelaku Nikah Siri oleh Edy Supriatna Sjafei*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi perkawinannya itu telah sah menurut syariat Islam karena rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama?
3. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, maupun di bidang hukum perdata kemasyarakatan pada khususnya dengan mempelajari literatur yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan suatu referensi dan akan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi sistem perkawinan maupun pelaksanaan perkawinan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian penulis ini juga diharapkan bermanfaat untuk pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan dalam hal membuat peraturan perundang-undangan mengenai sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan yang sesuai dengan hukum negara dan kaidah Islam agar terwujudnya pelaksanaan perkawinan yang sah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, perlu ditentukan pendekatan masalah apa yang digunakan. Selain bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dikaji, juga berguna dalam menentukan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka/data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah melalui wawancara yang dilakukan dengan responden yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data yang penulis dapatkan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) , untuk mencari konsep-

konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Dalam penulisan ini, data yang penulis perlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang merupakan ketentuan hukum tertulis, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku yang ditulis oleh ahli, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini, makalah-makalah, dan jurnal-jurnal.



3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum serta ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi dokumen

Dalam penelitian hukum normatif, untuk mendapatkan data sekunder maka dilakukan studi dokumen. Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan tertulis.

Dalam rangka studi dokumen ini, penulis mengadakan penelitian pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Rektorat Universitas Andalas, perpustakaan Wilayah Sumatera Barat.

b. Wawancara

Sedangkan untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap semua itu yang berkembang selama wawancara dilakukan. Teknik ini dilakukan adalah untuk melihat dan memahami pandangan responden tentang segala

sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, khususnya tentang pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ini dan sanksi hukumnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui studi pustaka dan dari hasil wawancara, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang terdiri dari:

a. Pengolahan Data

1 Editing

Editing yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis.

2 Coding

Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditentukan.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pengetahuan penulis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pembahasan tentang tinjauan umum mengenai perkawinan menurut hukum Islam, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum adat, bentuk-bentuk perkawinan, syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asas perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tinjauan umum tentang perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) dan pengaturannya, faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri, tindak pidana perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dan perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama secara umum.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang apa pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang

Perkawinan, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan dan beberapa contoh kasus perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Pengaturannya

1.1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam pelaksanaannya, perkawinan selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah memberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan. Namun, apabila perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan adalah tidak lebih daripada masalah keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam masa-masa pluralisme hukum perkawinan sebelum ditetapkannya undang-undang perkawinan sekarang, perbedaan yang demikian sangatlah kentara sekali. Dimana untuk satu golongan penduduk, umpamanya yang tunduk pada BW, hanya mengakui perkawinan itu suatu perbuatan keperdataan belaka yang menganggap acara-acara keagamaan menurut agama yang dianutnya (mempelai) hanya sekunder dan formalitas belaka. Sehingga oleh karenanya seorang pejabat agama dilarang keras untuk melaksanakan perkawinan sebelum prosedur keperdataannya dipenuhi. Hal demikian adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 26 BW yang menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Undang-undang hanya mengenal

"perkawinan perdata" yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.

Perkawinan adalah salah satu amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan untuk dipelihara sebaik-baiknya. Untuk dapat mempertahankan suatu perkawinan itu, maka Allah SWT memberikan peraturan-peraturan untuk ditaati, yaitu yang biasa disebut munakahat.

Di dalam Ilmu Fiqih, istilah perkawinan disebut dengan nikah. Nikah menurut bahasa Arab ada arti sebenarnya dan ada arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah "*dham*" yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan "*wathaa*" yang artinya bersetubuh. Adapun nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimaa') dan untuk membentuk keluarga dan membangun masyarakat yang bersih.

Mempersoalkan definisi nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah "sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata". Oleh mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya". Sedangkan ulama

Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.⁸

Pergaulan baik antara suami isteri akan berdampak sangat baik pula pada kedua mempelai. Dalam menjalankan hubungan rumah tangga, akan timbul rasa senasib seperjuangan, rasa tolong menolong, dan rasa saling membantu. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Hanafi).⁹

Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan pernikahan di dalam Al Quran dan hadist nabi, maka nikah dengan arti perjanjian dan perikatan lebih banyak dipakai daripada nikah dengan arti setubuh. Dalam pernikahan ada unsur perjanjian, karena aqad artinya ikatan atau perjanjian. Jadi aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Persoalan perkawinan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Karena itulah harus adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu aqad.

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal 45

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hal 1

Dalam Al Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa perkawinan pada hakekatnya sebagai perpaduan dua jiwa yaitu rasa kasih sayang dan saling mencintai yang timbul dari hubungan yang akrab dan mesra antara suami dan istri. Bunyi dari Q.S.Ar-Ruum ayat 21 ini adalah:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Selain merupakan sarana yang luhur untuk memenuhi dorongan biologis dan psikologis antara lawan jenisnya, pernikahan juga dimaksudkan sebagai cara yang paling utama untuk mendapatkan keturunan yang akan meramaikan dan memakmurkan bumi. Seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa' ayat 1, yang berbunyi:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada TuhanMu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Dengan adanya keturunan yang diberikan oleh Allah, maka tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dapat diwujudkan. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama. Menurut hukum Islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk memelihara cinta dan kasih sayang, memelihara moral dan kesucian serta mengatur hubungan suami istri, mengendalikan orang tua dan membentuk latar belakang yang kukuh untuk merawat dan mengasuh anak-anak, untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, serta untuk menimbulkan rasa ketakwaan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab.

1.2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama untuk memecahkan berbagai masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, definisi dari perkawinan adalah sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Yang dimaksud dengan arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian. Dalam Hukum Perdata, janji adalah suatu sendi yang amat penting. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan, demikian juga halnya dengan perkawinan. Dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Di dalam perjanjian biasa, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan sendiri dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu akan berlaku terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. Tetapi tidak demikian dalam hal perjanjian berupa suatu perkawinan. Sekalipun pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian juga adanya persetujuan atau

perjanjian perkawinan itu telah sejak semula ditentukan oleh hukum, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Para pihak, yaitu pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Rumusan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas mencerminkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang juga mempunyai peranan yang penting.

1.3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru karena ketidaksamaan inilah maka adat merupakan unsur yang penting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Di negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah berbeda antar satu sama lainnya, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu ke Indonesiaannya. Maka oleh karena itu bangsa Indonesia dikatakan bangsa yang berbineka tunggal ika (walaupun berbeda-beda daerah suku bangsanya, tetapi satu juga yaitu dasar dan sifat ke Indonesiaannya). Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber dari hukum adat kita.

Hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat itu karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

Dengan adat istiadat yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia, maka dalam hal melakukan perkawinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama caranya.

Yang dimaksud dengan perkawinan dalam hukum adat adalah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bekal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan

kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Bagi kelompok-kelompok wangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut. Jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.

Bila kelompok-kelompok wangsa tidak bernilai persekutuan hukum, jika keluarga itu (telah menjadi) primer di dalam kehidupan hukum, maka meskipun pengaruh kelompok wangsa masih tetap terasa, perkawinan pertama-tama adalah urusan keluarga, anak-anaknya melepaskan diri daripadanya segera atau beberapa waktu sesudah mereka kawin. Jadi mereka melanjutkan garis hidup (sosial) orang tuanya (salah seorang diantara orang tuanya).

Perkawinan (yang dipilih dengan tepat) dapat pula mempertahankan gengsi/martabat kelas-kelas di dalam dan di luar persekutuan. Dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1987, hal 122

Berbagai fungsi perkawinan itu bermanifestasi di dalam campur tangan kepala-kepala kerabat (clan), orang tua (ayah dan ibu), kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya di dalam tata hukum, perbuatannya harus terang. Para kepala persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya.

Namun, meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, bagaimanapun juga perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di dalamnya, jadi soal suka atau benci.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti dan mendapat perhatian serta diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta keseluruhan keluarganya mengharapkan juga restu bagi kedua mempelai, hingga mereka setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia sampai kakek nenek. Perkawinan memiliki makna yang penting, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dengan upacara.

Pada umumnya sebelum dilangsungkan perkawinan menurut adat istiadat dalam masyarakat Indonesia, terlebih dahulu diadakan pertunangan antara calon istri dan calon suami. Pertunangan ini timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga bakal suami dan pihak keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu ada suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa perkawinan tujuannya adalah untuk mensahkan status antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual agar mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni, dimana keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah. Untuk mencapai tujuan tersebutlah, manusia melaksanakan perkawinan sebagai suatu hubungan yang suci, yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada beberapa bentuk perkawinan yang biasanya dijalankan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini juga dikenal dalam hukum Islam, diantaranya adalah :

1. Perkawinan Hipogami dan Perkawinan Hipergami.

Perkawinan hipogami adalah suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan di bawahnya, atau sebaliknya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan status lebih rendah ialah terletak pada agama yang dianut dan tingkat ketakwaan laki-laki atau perempuan. Dengan demikian seorang wanita muslimah tidak layak bersedia dinikah oleh laki-laki di luar muslim. Apabila di dalam perkawinan tersebut kedudukannya lebih tinggi, maka keadaan tersebut disebut hipergami. Di dalam hukum Islam kedua bentuk perkawinan tersebut dibolehkan dan tidak dilarang.

2. Perkawinan Homogami dan Perkawinan Heterogami.

Perkawinan homogami adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya memiliki kedudukan yang sama. Di dalam hukum Islam

kesamaan kedudukan atau kesederajatan antara suami istri didasarkan atas prinsip-prinsip Islam, yaitu :

- Faktor ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini terdapat di dalam Quran Surat Al Hujurat ayat 13. Di dalam ayat ini dinyatakan bahwa orang yang termulia di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa.
- Perilaku keagamaan. Prinsip ini terdapat di dalam Quran Surat An Nur ayat 3 dan 26. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa laki-laki berzina hanya untuk perempuan berzina atau perempuan musyrik, begitu juga sebaliknya. Sedangkan di dalam ayat 26 dinyatakan bahwa perempuan jahat untuk laki-laki jahat, begitu juga sebaliknya, dan perempuan baik untuk laki-laki baik, begitu juga sebaliknya.

Sedangkan perkawinan heterogami adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kedudukan sosialnya, jadi kedua-duanya tidak memenuhi syarat kafa'ah (kesederajatan). Contoh heterogami dalam Islam adalah perempuan muslimin kawin dengan laki-laki musyrik, wanita muslim baik-baik kawin dengan laki-laki pezina.

3. Perkawinan Monogami, Perkawinan Poligami, dan Perkawinan Poliandri.

Monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Prinsip pernikahan seperti ini dianut di dalam Islam, yang dinyatakan di dalam Quran Surat An Nisa' ayat 3.

Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan, seperti yang dinyatakan di dalam Quran Surat An Nisa' ayat 3.

Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki yang di dalam hukum Islam nyata-nyata sesuai dengan Quran Surat An Nisa' ayat 24. Dalam surat ini dinyatakan bahwa diharamkan bagi laki-laki mengawini perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan itu telah dituliskan Allah untuk laki-laki tersebut.

4. Endogami dan Eksogami.

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sistem perkawinan yang banyak dianut adalah endogami dan eksogami. Pelanggaran terhadap kedua sistem perkawinan ini dapat menimbulkan sanksi tertentu.

Yang dimaksud dengan perkawinan endogami ialah suatu bentuk perkawinan/pernikahan yang berlaku dan atau dianut di dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat melakukan perkawinan dengan anggota yang lain di dalam clannya sendiri. Di dalam syari'at/hukum Islam, bentuk perkawinan endogami ini tidak dilarang, akan tetapi di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa Nash Al Quran yang menentukan batas-batasnya, yaitu :

- Pada prinsipnya endogami dibolehkan dalam Islam dengan syarat hubungan darah antara laki-laki pengampuan yang akan nikah tidak terlalu dekat, akan tetapi Islam melarang hubungan karena hubungan susuan. Kaidah ini ditegaskan di dalam Quran Surat An Nisa' ayat 23.

- Perkawinan/pernikahan dalam bentuk endogami yang berbeda agama tetap haram hukumnya, sesuai dengan dalil Naqly Surat Al Baqarah ayat 221.
- Pernikahan karena hubungan semenda di dalam Islam, yang sesuai dengan Nash Al Quran Surat An Nisa' ayat 24.

Perkawinan eksogami adalah pernikahan antara laki-laki satu kelompok keluarga/clan dengan perempuan di luar kelompok keluarga/clannya.

Perkawinan eksogami di dalam hukum Islam memiliki beberapa batasan yaitu sebagai berikut :

- Wanita muslim dilarang nikah dengan laki-laki di luar anggota kelompok/clannya yang bukan muslimnya. Ketentuan ini berdasarkan Quran Surat Al Baqarah ayat 221 dan Quran Surat Al Muntahanah ayat 10.
- Wanita atau laki-laki muslim boleh nikah dengan laki-laki atau wanita di luar anggota kelompok/clannya yang beragama Islam.
- Laki-laki muslim dibolehkan kawin dengan wanita di luar anggota kelompok/clannya yang tergolong ahli kitab sesuai dengan Nash Al Quran Surat Al Maidah ayat 5.
- Seorang laki-laki muslim dilarang menikahi wanita di luar anggota kelompok yang tidak menganut agama (atheis).

3. Syarat Sah Perkawinan

3.1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, saat sahnya nikah merupakan penentuan yang sangat penting, terutama untuk menentukan sejak kapan hubungan kelamin itu dihalalkan antara seorang pria dan wanita dan bebas dari dosa perzinahan. Menurut hukum perkawinan dalam Islam, suatu perkawinan/pernikahan dianggap sah dan berdampak hukum positif adalah apabila syarat-syarat dan rukun perkawinan dalam Islam telah terpenuhi. Dalam hubungan ini, maka Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun. Rukun perkawinan adalah aturan yang harus ada dan merupakan bagian dari hakikat perkawinan seperti laki-laki, wali, dan sebagainya. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat wali itu harus laki-laki, balig, dan sebagainya. Syarat sah perkawinan ialah syarat-syarat tergantung pada sahnya perkawinan, yaitu bila terdapat padanya syarat-syarat tersebut, maka akad kawinnya sah menurut syarak, sehingga berlaku padanya semua hukum syarak dan hak-hak yang bertalian dengannya.

Rukun perkawinan adalah :

1. Calon Mempelai

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan adalah suatu *conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak) dan absolut. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Sebaiknya calon pengantin laki-laki itu

sudah berusia 25 tahun, sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun. Pendapat ini tentunya tidak mutlak, harus dilihat pada situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai itu. Baligh dan berakal maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan. Jadi kedua calon mempelai bukan orang yang di bawah pengampuan (curatele).

2. Ijab Qabul

Yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan kehendak dari calon penganten perempuan yang diwakili oleh wali, yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon penganten laki-laki atas ijab calon penganten perempuan.

3. Wali Nikah

Wali yaitu pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan. Syarat-syarat wali nikah adalah Islam (syarat ini berdasarkan Quran Surat Al Imron ayat 28), baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum perkawinan Islam, wali ada 3, yaitu :

a) Wali mujbir

Wali mujbir adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar.

b) Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon penganten perempuan.

c) Wali hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim ini termasuk Qadli di Pengadilan.

4. Saksi Nikah

Saksi di dalam pernikahan harus dua orang (HR. Ahmad). Syarat-syarat saksi nikah adalah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, islam, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), mengerti maksud ijab qabul, kuat ingatannya, berakhlak baik dan tidak sedang menjadi wali.

5. Mahar (Mas kawin)

Dengan adanya sebab nikah, seorang suami wajib memberikan sesuatu kepada istri baik berwujud maupun berupa barang. Pemberian ini disebut mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki dengan permintaan pihak perempuan dengan batas-batas yang ma'ruf. Apabila mahar telah diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri secara individual.

3.2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Mengenai syarat sah suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pengertian kepercayaan disini dilihat dalam kaitannya dengan kata agama.

Menurut ketentuan undang-undang di atas, kedua ayat dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pendaftaran/pencatatannya. Abdullah Sidik dalam salah satu karyanya menulis bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini sejatinya dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat kewajiban bagi negara RI untuk menjalankan hukum setiap agama yang ber-Ketuhanan Yang

Maha Esa, kecuali unsur-unsur agama yang bertentangan dengan Pancasila.¹¹ Dalam lalu lintas hukum perdata, saat (mulai) keabsahan perkawinan suami istri, menentukan kapan mulainya pihak yang satu sebagai ahli waris dari pihak lainnya, kapan harta bersama dianggap mulai ada yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hubungan perjanjian/perikatan yang diadakan oleh mereka atau oleh salah satu daripadanya. Yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan pasal-pasal tersebut ditentukan dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi :

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup, wali, keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, hal 272

- d. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- e. Kedua pihak dalam keadaan tidak kawin.
- f. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur/ketentuan formalitas yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi :

- a. Harus mengajukan laporan/pemberitahuan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk mengenai kehendak untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, maka dilakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat :
 - nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
 - hari, tanggal, jam, dan tempat dilangsungkannya perkawinan.

4. Asas Perkawinan.

4.1. Asas Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Prinsip atau asas perkawinan yang dikehendaki oleh Al Quran itu adalah monogami. Islam memandang perkawinan itu sebagai suatu ikatan yang suci, tidak dengan mudah dapat diputuskan begitu saja. Hal ini terdapat di dalam Al Quran Surat An Nisa' ayat 128, yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya, maka lebih baik keduanya berdamai daripada bercerai.

Namun, dalam keadaan-keadaan istimewa (tertentu) saja, perkawinan lebih dari seorang isteri dan paling banyak dengan empat isteri dengan syarat-syarat tertentu dapat diperkenankan. Adapun dasar hukum Islam yang membolehkan poligami itu diterangkan dalam Al Quran Surat An Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

"Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya".

Berdasarkan ketentuan di dalam ayat ini dinyatakan bahwa prinsip perkawinan menurut Islam itu adalah monogami tersimpul dari kata-kata fawahidath (hanya seorang saja), satu itu lebih baik agar kamu terhindar dari perbuatan aniaya, jadi poligami hanya pengecualian.

Asas hukum perkawinan Islam itu, khususnya mengenai poligami sekurangnya ada dua aliran, yaitu :¹²

- a. Aliran Ahlul Sunnah yang traditionil berpendapat bahwa asas hukum perkawinan Islam itu adalah poligami terbatas dan terkontrol, dan perkawinan monogami itu dianggap pengecualian. Alasan yang biasa dikemukakan adalah adanya sunnah nabi dan kenyataan-kenyataan sosial, dimana jumlah wanita hampir sering lebih banyak dari golongan pria, atau golongan pria yang mampu membiayai kehidupan keluarga secara layak itu sering lebih kecil jumlahnya dari kaum wanita yang membutuhkan kehidupan yang pantas. Aliran ini adalah paham dari mazhab-mazhab sunny, juga Prof. Dr. Syaltout dalam bukunya *Al Islam Aqidah Wal Syari'ah*.
- b. Aliran modern, yang berpendapat sebaliknya. Menurut aliran ini bahwa asas hukum perkawinan Islam itu monogami, sedangkan poligami itu merupakan pengecualian atau sebagai jalan keluar bagi pemecahan masalah-masalah sosial yang timbul dalam kenyataan masyarakat. Bagi aliran modern ini, praktek perkawinan Nabi Muhammad SAW yang poligami itu tidak dapat dijadikan ukuran umum dari asas perkawinan Islam yang dikehendaki Al Quran. Karena perkawinan nabi itu terjadi dalam suasana revolusi besar dan diantara perkawinan nabi itu bersifat politis dalam rangka strategi

¹² Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, hal 15

sosial menjinakkan suku-suku Arab yang berpengaruh. Pendapat ini terdapat antara lain dalam bukunya Maulana Muhammad Ali "The Religion of Islam", bukunya Sayed Ameer Ali "The Spirit of Islam" dan pendapat aliran baru Mesir yang disebarluaskan oleh Al Manaar dibawah pimpinan redaksinya M. Rasyid Ridha.

Poligami dalam Islam bukanlah semata-mata surga buat laki-laki. Akan tetapi poligami hanya dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti keadaan yang bersifat objektif dimana keadaan masyarakat dan atau negara sedemikian rupa sehingga poligami terbatas itu dipakai sebagai pemecahan masalah dan krisis sosial atau keadaan yang bersifat subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan, terutama dimana sang isteri tidak dapat melahirkan keturunan dan suami amat menghendakinya dan suami tidak menghendaki perceraian dengan isterinya yang pertama itu.¹³

Dalam poligami ini, seorang laki-laki dibebani tanggung jawab untuk sanggup berlaku adil dalam segala segi terhadap isteri-isterinya itu. Di samping itu juga ditemui dalam Tafsir dan Hadis beberapa perkara yang menunjukkan pembatasan poligami. Diantaranya perkara Harits Ibn Qais, bahwa dia berkata : Saya masuk Islam dalam keadaan punya delapan orang isteri, lalu saya datang menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan keadaan saya itu kepada beliau, Beliau kemudian bersabda : "Pilihlah empat di antara mereka".

¹³ *Ibid.*, hal 89

4.2. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah berazaskan monogami, seperti yang ditegaskan di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang ini. Tetapi apabila seseorang menghendaki untuk beristri lebih dari satu maka diberikan kepadanya kesempatan, seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dalam Pasal 27 BW menegaskan bahwa hukum perkawinan BW bersendikan monogami mutlak. Bagi mereka yang tunduk pada BW, misalnya golongan WNI keturunan Tionghoa yang kemudian masuk agama Islam, tidak boleh dalam keadaan apapun juga mengambil istri kedua. Karena ketundukan WNI pada BW tidak bisa dihilangkan atau disingkirkan dengan pemeluk agama Islam atau agama apa saja. Kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggantikan peraturan perkawinan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan lain yang merupakan pokok pada zaman Hindia Belanda.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang, seperti ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 c.

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk boleh beristri lebih dari seorang terdapat di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang bunyinya:

"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana yang kita ketahui dibolehkan poligami tentu saja ada akibat baik dan akibat buruknya. Supaya tidak terjadi akibat-akibat buruk, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan syarat-syarat yang berat terhadap suami yang akan melakukan poligami. Syarat-syarat itu disebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang ini. Bunyi dari Pasal 5 ayat 1 adalah :

"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan Pasal 5 ayat 2 berbunyi :

"Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan".

Ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang ini diulang kembali di dalam Pasal 41 b,c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan tambahan penjelasan bahwa :

- Dalam hal persetujuan lisan dari isteri/isteri-isteri, maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu (keterangan tentang penghasilan).
- Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan pernyataan/janji itu).

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Perkawinan Sirri)

1. Pengertian Perkawinan Sirri dan Pengaturannya

1.1. Pengertian Perkawinan Sirri

Adanya perkawinan sirri atau nikah dibawah tangan yang dikenal dan dipraktekkan oleh sebagian umat Islam di Indonesia berasal dari tradisi masyarakat Islam di kawasan Negara Arab. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal di kalangan para ulama. Istilah kawin sirri sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat Islam. Sebab kitab Al-muwatha', mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya "Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam".¹⁴

Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'I berpendapat

¹⁴ www.irsyadfaizal.wordpress.com, *Kawin Siri oleh Faizal*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat.

Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan sirri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (I'lan), keberadaan saksi hanya pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi'I, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (I'lan). Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan aqad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman (I'lan wa syuhr) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Dalam perkembangannya dimasyarakat Islam, perkawinan sirri dipandang sah menurut agama. Pada perkembangan selanjutnya istilah sirri ini dikaitkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Kawin sirri bermakna kawin yang tidak dicatatkan pada petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah KUA. Kawin sirri yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, memenuhi baik rukun dan syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada

PPN seperti diatur dan ditentukan UU No. 1 tahun 1974. Biasanya nikah sirri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja.

Pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul-'ursy. Sementara dalam proses kawin sirri yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja, sedangkan sunah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut waliyah/perayaan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat terjadinya perkawinan.

Ada beberapa pengertian dari pernikahan sirri diantaranya adalah :

1. Kata sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin sirri menurut artinya adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Sehingga orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Nikah sirri

adalah nikah yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatat di KUA sehingga tidak punya surat nikah resmi. Karena tidak didaftarkan secara resmi ke KUA, sehingga tidak ada jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat. Negara tidak dapat melindungi secara hukum negara hak-hak istri/suami/anak, karena pernikahannya tidak memenuhi syarat administratif kenegaraan.

2. Dalam pandangan Islam, nikah sirri adalah sah karena telah memenuhi ketentuan mutlak untuk sahnya akad nikah, yang ditandai dengan adanya wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi dan dilaksanakan oleh penghulu yang tidak terdaftar. Sedangkan sunah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut waliyah/perayaan.
3. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara sirri (rahasia) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali. Sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya : "wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil.

4. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya takut mendapat stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

1.2. Pengaturan Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena perkawinan dilakukan diluar ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam BAB I tentang dasar perkawinan (dalam Pasal 1 dan 2).

Nikah sirri hanya dikenal di Indonesia. Pernikahan sirri tidak mengandung tanggung jawab secara hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya nikah sirri sangat merugikan istri dan anak-anak yang dilahirkan, karena tidak ada perlindungan hukum yang akan membantunya. Walaupun begitu, masih banyak wanita yang rela untuk dinikahi sirri. Di Indonesia saja, pelaku nikah sirri sudah berjumlah ribuan bahkan mungkin jutaan orang.

Tidak ada peraturan yang mengatur secara resmi pernikahan sirri. Pernikahan sirri berada di luar tanggung jawab Pengadilan dan KUA. Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan di bawah tangan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dicatatkan di instansi pemerintah yang berwenang yaitu KUA. Sementara perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan PPN dan tidak dicatatkan di KUA. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah perkawinan yang dilakukan secara resmi dan diakui oleh pemerintah, hak dan kewajibannya pun telah diatur oleh Undang-Undang, misalnya hak warisan, hak asuh anak, dan lainnya. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Mengenai pencatatan perkawinan, di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan diawasi oleh PPN. Pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari PPN akan dikenakan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50 karena merupakan suatu pelanggaran. Namun hukuman ini sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri

Fenomena perkawinan sirri dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah realita yang masih terus terjadi sampai saat sekarang. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pelakunya, mulai dari alasan sosiologis,

ekonomis, alasan personal, dan berbagai alasan lainnya. Dari maraknya kasus nikah sirri yang terjadi, ada beberapa faktor atau alasan mengapa perkawinan itu dilaksanakan, diantaranya yaitu:

- a. Pernikahan sirri dilakukan tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan wali pihak perempuan tidak setuju atau karena tidak bisa menghadirkan wali dari pihak perempuan. Oleh karenanya mereka lebih memilih menikah sirri.
- b. Disebabkan alasan ekonomis, yaitu untuk menghemat biaya, karena pengurusan administrasi yang mahal. Seiring dengan lahirnya instansi pemerintah yang mengurus masalah agama (Departemen Agama), maka setiap pernikahan yang dicatatkan pada kantor tersebut memiliki beban finansial karena harus mengeluarkan biaya tertentu. Untuk honor penghulu saja berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta sehingga beberapa kalangan terasa berat.¹⁵ Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, izin dari atasan jika PNS/anggota TNI/Polri).
- c. Pernikahan sirri terjadi karena persoalan sosiologis. Alasan sosiologisnya, pernikahan sudah berlangsung sebelum lahirnya negara yang mengatur persoalan pernikahan. Sejak zaman dulu, banyak yang melakukan pernikahan pada penghulu, ulama atau guru pesantren, sementara anak-

¹⁵ www.tribun-timur.com, *Wacana Nikah Siri Dalam Kebijakan Publik oleh Muslimin B.Putra*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

anak hasil dari perkawinan sirri tetap mendapatkan hak waris karena agama telah mengaturnya.

- d. Pernikahan sirri biasanya terjadi untuk nikah kedua dan seterusnya (poligami). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa pria yang ingin berpoligami harus meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama. Namun untuk mendapatkan izin dari istri pertama sangat sulit, maka yang dilakukan para pria yang ingin berpoligami ini adalah mereka tetap melaksanakan poligami dengan jalan nikah di bawah tangan alias nikah sirri. Nikah sirri sebenarnya hanyalah pengesahan azas poligami itu sendiri diluar izin/pengetahuan istri/suami yang dinikahi secara sah, dengan kata lain “melegalisir penolakan istri atau suami dari pernikahan yang sebelumnya”.
- e. Bagi pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam Pasal 4 ayat (1) diantaranya menyebutkan, bahwa pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak boleh beristri lebih dari seorang. Apabila itu terjadi wajib melapor dan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat dan pimpinannya. Dengan sulitnya persyaratan untuk poligami ini, maka pegawai negeri ini memilih untuk menikah sirri. Selain itu bagi pegawai negeri yang menikah tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya, maka ia dapat terhindar dari hukuman administratif yang dijatuhkan oleh atasannya. Karena PNS yang melanggar ketentuan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45

Tahun 1990, akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP No 30 Tahun 1980 jo PP No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

- f. Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan.
- g. Salah seorang dari calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.
- h. Bagi kalangan kelas menengah ke bawah, pernikahan sirri tersebut dipengaruhi karena adanya keterbatasan pengetahuan mengenai hukum dan akibat yang ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut.
- i. Alasan/ motif pernikahan sirri dari pihak perempuan adalah karena faktor uang, daya tarik fisik, dan rayuan. Pemahaman yang mendalam tentang hak perempuan, perubahan mindset tentang hidup dalam kemewahan, serta kultur yang menempatkan perempuan pada posisi subordinan seperti menuruti kata orang lain dan kebergantungan terhadap pasangan menjadi sebagian akar masalahnya. Sementara alasan lelaki menikahi sirri pasangannya lebih banyak karena ketidakpuasan dari istri sahnya, baik itu terkait dari fisik istrinya dan juga seksual.¹⁶

¹⁶ www.hariansumutpos.com, *Sanksi Hukum Menanti Pelaku Nikah Siri*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

3. Tindak Pidana Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum

Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Mengenai ketentuan pidana dalam RUU yang disusun oleh Kementrian Agama ini, dituliskan secara khusus dalam bab XXI. Dalam RUU ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkawinan dan sanksi pidananya, diantaranya adalah :

- a) Pasal 143 yang mengatur tentang tindak pidana pencatatan perkawinan. Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan.
- b) Pasal 144 yang mengatur tentang tindak pidana perkawinan mut'ah (perkawinan kontrak). Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun.
- c) Pasal 145 yang mengatur tentang tindak pidana pelaku poligami yang tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan. Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan.
- d) Pasal 146 yang mengatur tentang tindak pidana bagi suami yang menceraikan isterinya tidak di depan sidang pengadilan. Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan.
- e) Pasal 147 yang mengatur tentang tindak pidana zina bagi laki-laki yang menolak menikahi perempuan hamil karena zina dengannya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.

- f) Pasal 148 mengatur tentang tindak pidana pelanggaran kewajiban oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000.
- g) Pasal 149 mengatur tentang tindak pidana pelaku yang bertindak seolah-olah sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan/atau wali hakim. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.
- h) Pasal 150 mengatur tentang tindak pidana pelaku yang sengaja bertindak sebagai wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

Dalam Pasal 151 RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini dinyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 144, 146, 147 dan 148 adalah tindak pidana kejahatan.

Ada tiga poin tindakan pidana untuk perkawinan dalam RUU ini, diantaranya adalah :

1. Melangsungkan perkawinan tidak di depan Pejabat Pencatat Nikah dipidana denda Rp. 6 juta dan hukuman kurungan paling lama 6 bulan.

Draft RUU ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, karena sebagian ulama menganggap masalah pencatatan perkawinan bukan rukun dan syarat sah perkawinan. Secara eksplisit, dalam Al Quran, hadis, dan fikih munakahat, masalah pencatatan perkawinan tidak diatur. Memang benar bahwa keberadaan pencatatan nikah memang penting untuk memperkuat legitimasi perkawinan tersebut. Namun, pencatatan

perkawinan itu tidak seharusnya melemahkan kekuatan hukum syar'i dan mengkriminalisasi pelaku perkawinan sirri. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, mengungkapkan bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial, namun keberlakuan suatu peraturan secara sosiologis tidak dapat dipaksakan hanya dengan sanksi pidana.¹⁷

2. Melangsungkan perkawinan kontrak (mut'ah) dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinan batal demi hukum.

Berkenaan dengan hukum perkawinan kontrak ini, para ulama sependapat bahwa nikah kontrak hukumnya haram. MUI telah mengeluarkan fatwa sehubungan dengan nikah kontrak atau nikah mut'ah pada tanggal 25 Oktober 1997. Dalam fatwanya tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena MUI berpendapat nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Subrah Al-Juhni meriwayatkan bahwa ketika dia mengikuti gazwah penaklukan mekah, Rasulullah mengizinkan Subrah dan sahabat yang lain untuk melakukan pernikahan mut'ah. Dia berkata "tidak ada seorangpun dari kami yang meninggalkannya sampai Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah bersabda "aku pernah

¹⁷ www.oasis-pecintailmu.blogspot.com, *Kewenangan Peradilan Agama dan RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama oleh Wasis Priyanto*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah, tapi ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat".¹⁸

3. Pria yang menikah dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa memperoleh izin pengadilan, dipidana denda Rp. 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan.

Dalam Pasal 152 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini memuat rumusan kemungkinan perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perkawinan setelah menerima pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negri setempat.

4. Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Secara Umum

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama terdiri dari 24 Bab dan 154 Pasal, yang pada pokoknya mengatur mengenai perkawinan. Dalam RUU ini terdapat perubahan yang cukup signifikan, karena ada beberapa hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi diatur dalam RUU tersebut, yaitu diantaranya mengenai ketentuan pemberian mahar (Bab V), ketentuan mengenai perkawinan perempuan hamil karena zina (Bab VIII), ketentuan mengenai perkawinan campuran (Bab XX), dan ketentuan pidana (Bab XXI). Sebagian sudah ada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

¹⁸ www.answers.yahoo.com, *Tanya Jawab Seputar Perkawinan oleh Della Anna*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam, namun diatur lebih mendetil dan terperinci lagi dalam RUU ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama ini mengatur ketentuan tentang penjatuhan talak oleh suami yang dilakukan tidak di depan sidang Pengadilan. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif di negara kita, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak suami, tetapi harus dilakukan di depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur talak menurut agama Islam, yang di dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut dengan istilah cerai talak.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Mengenai alasan-alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dapat juga dilihat di dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Adapun tata cara untuk menjatuhkan talak diatur pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Akan tetapi, peraturan tentang talak yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya hanya mengatur tentang cara menjatuhkan talak saja (harus di depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan/alasan-alasan yang sah), tidak mengatur persoalan sah tidaknya talak. Jadi dalam Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai pemberian sanksi bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya tidak di depan sidang Pengadilan. Tidak ada hukuman yang dapat dikenakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan ini.

Di dalam Rancangan Undang-Undang inilah diatur mengenai sanksi pidana bagi para pihak yang menjatuhkan talak tidak di depan sidang Pengadilan. Demi mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah praktek talak di bawah tangan, maka selain mengatur tata cara penjatuhan talak oleh suami terhadap isteri harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan di depan sidang Pengadilan, maka perlu ditetapkan pula sanksi pidana terhadap penyimpangan dalam penjatuhan talak ini agar hak talak yang dimiliki suami tidak digunakan secara ceroboh dan semena-mena. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur di dalam Pasal 119 dan Pasal 146.

Bunyi dari Pasal 119 adalah :

“Dalam hal talak dijatuhkan tidak di depan sidang Pengadilan, maka istri dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan dan/atau dirugikan akibat talak tersebut berhak mengajukan gugatannya ke Pengadilan”.

Sedangkan bunyi dari Pasal 146 adalah :

“Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 119 Rancangan Undang-Undang ini, maka akan diberikan ancaman pidana kepada

pelanggarnya, yaitu denda paling banyak Rp 6 juta/hukuman kurungan paling lama 6 bulan”.

Jadi ketentuan mengenai penjatuhan talak di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya bersifat sebagai anjuran belaka. Ini berarti apabila orang mentaatinya, maka pentaatan tersebut semata karena keharusan belaka, bukan lantaran takut pada sanksi.¹⁹ Dan dalam peraturan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama memuat ancaman pidana terhadap si pelanggar ketentuan tentang prosedur menjatuhkan talak yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Selain mengatur mengenai ketentuan penjatuhan talak, di dalam Rancangan Undang-Undang ini juga diatur mengenai ketentuan berpoligami. Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur mengenai ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan poligami tanpa mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. Sanksi hanya diatur di dalam Peraturan Pelaksananya yaitu berupa denda Rp 7.500. Sedangkan di dalam Rancangan Undang-Undang ini diberikan sanksi yang lebih tegas, seperti yang diatur di dalam Pasal 145 yang berbunyi “setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 52 Ayat 1 didenda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan”.

¹⁹ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Alumni, 1978, hal 71

Di dalam Rancangan Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi bagi orang yang bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan sebagai orang yang sengaja bertindak sebagai wali nikah. Hal ini diatur di dalam Pasal 149 dan Pasal 150.

Bunyi dari Pasal 149 adalah :

“Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun”.

Bunyi dari Pasal 150 adalah :

“Setiap orang yang tidak berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dengan sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun”.

Ketentuan mengenai Pejabat Pencatat Nikah dan wali nikah yang tidak mempunyai kewenangan ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini hanya diatur mengenai pembatalan terhadap perkawinan yang dilaksanakan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dan wali nikah yang tidak sah, tanpa sanksi pidananya.

Selain itu, yang juga menjadi perdebatan di dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah ketentuan mengenai pemberian mahar. Dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan bahwa mahar sebagai salah satu rukun nikah. Oleh karenanya, untuk melaksanakan perkawinan menurut RUU ini harus ada mahar. Dalam Pasal 13 ayat (2) ditentukan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan pada ayat (1) adalah tidak sah.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur mengenai pemberian mahar. Ketentuan mengenai pemberian mahar ini diatur di dalam Kompilasi

Hukum Islam sebagai salah satu hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Di dalam Pasal 14 KHI tidak disebutkan bahwa mahar sebagai salah satu rukun nikah. Kedudukan mahar di dalam KHI dirumuskan dalam Pasal 34 ayat (1) yang menentukan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Meskipun mahar bukan merupakan rukun perkawinan, tetapi Pasal 30 KHI menentukan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, dan mahar menjadi hak pribadi istri (Pasal 32 KHI).

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) RUU, yang menjadikan mahar sebagai salah satu faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan ini menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam, karena ketentuan ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Di dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah. Keadaan ini mengandung arti bahwa apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut tetap sah.²⁰ Ketentuan ini dapat dilihat dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 236 yang menunjukkan bahwa mahar bukan merupakan rukun pada akad nikah. Ayat tersebut berbunyi :

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka, orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hal 56

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Kawin campur juga menjadi objek hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama. Dalam Pasal 142 ayat (3) dinyatakan bahwa pria warga negara asing (WNA) yang hendak memperistri perempuan Indonesia diwajibkan menyerahkan uang sebagai jaminan. Jumlahnya mencapai setengah miliar. Diwajibkannya pria asing untuk menyerahkan uang jaminan Rp 500 juta tersebut adalah sebagai jaminan isteri tetap mendapatkan nafkah apabila sang suami pergi tanpa pemberitahuan. Namun, saat menikah uang tersebut tidak diserahkan langsung kepada sang isteri, melainkan dititipkan ke Bank Syariah.

Di dalam Penjelasan Pasal 142 ayat (3) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pembebanan uang jaminan sebesar Rp 500 juta terhadap calon suami warga negara asing tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak, apabila suami menelantarkan, tidak memberi nafkah, meninggalkan Indonesia secara diam-diam, murtad, menceraikan dan lain-lain yang merugikan kepentingan isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Uang jaminan tersebut menjadi hak isteri berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan eksekusi isteri. Apabila kehidupan perkawinan berjalan secara wajar dan baik selama 10 tahun maka uang jaminan tersebut dapat diminta oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama.

Sedangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan hanya diatur mengenai pemenuhan syarat perkawinan oleh hukum masing-masing pasangan dan pelangsungan perkawinan campuran. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak diatur mengenai kewajiban yang dibebani terhadap warga

negara asing apabila ia lalai dari kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah terhadap isteri dan anak-anaknya.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan ketentuan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Umum dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini tidak secara tegas menunjuk kesahan suatu perkawinan. Dilihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2), timbul kesan bahwa pencatatan perkawinan hanya sekedar perbuatan administrasi saja, sedangkan perkawinannya telah sah saat dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemisahan ketentuan pencatatan perkawinan dan

sahnya perkawinan menurut agama masing-masing inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang menentukan atau tidaknya pencatatan perkawinan terhadap kesahan perkawinan tersebut. Seharusnya ketentuan ini digabung menjadi satu pasal yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan “wajib” dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pencatatan perkawinan ini menjadi satu bagian dari tata cara perkawinan menurut agama masing-masing. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini akan menimbulkan kepastian hukum.

Dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Karena peristiwa perkawinan tersebut dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain dan administrasi negara berjalan dengan tertib. Selain itu, pencatatan perkawinan ini juga dapat menjamin adanya kepastian hukum di bidang perkawinan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah. Tujuan dari pencatatan nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang ini adalah agar pernikahan tersebut mendapat kepastian hukum.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan perkawinan pada Lembaga Pencatatan Sipil ini adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Selain itu, jika memiliki dokumen resmi berupa akta nikah maka apabila salah satu pihak tidak bertanggung jawab, pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara merupakan salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (bayyinah syar'iyyah), selain kesaksian saksi, sumpah, dan pengakuan (iqrar). Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'iy. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis.²¹

Para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah dan sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan analogi dari Quran Surat Al Baqarah ayat 282. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan untuk waktu yang langgeng dan abadi, oleh karenanya harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah). 'Ilanun nikah berarti menyiarkan atau mengumumkan kepada tetangga terdekat bahwa telah terjadi aqduu al nikah (akad nikah) antara perempuan dari keluarga si anu dengan laki-laki dari si polan dengan mengucapkan ijab dan qabul. Walimah dan 'ilanun nikah sangat penting artinya dalam kehidupan

²¹ www.hizbut-tahrir.com, *Hukum Islam Tentang Nikah Siri* oleh Syamsuddin Ramadhan An Nawiyy, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

berkeluarga berkorong kampung dan bermasyarakat, demi untuk menjaga sangkaan atau kecurigaan yang tidak baik dari anggota masyarakat sekitarnya tentang pergaulan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan muhrim.²² Namun, walimah ini hukumnya sunnah. Artinya, apabila perkawinan yang sah secara syar'i itu tidak diselenggarakan walimah sekalipun, atau tidak dicatat sekalipun, tidak berarti perkawinan menjadi batal atau perkawinan menjadi "tidak mempunyai kekuatan hukum" atau perkawinan menjadi lemah hukum.²³

Pada tahun 2006, MUI juga telah mengeluarkan fatwanya yang menetapkan bahwa nikah sirri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga, tetapi haram hukumnya jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif. Hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia ini menjelaskan, nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sengketa terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris ataupun hak asuh anak, maka tuntutan pemenuhan hak-hak ini akan sulit dipenuhi, karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 adalah perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan hakim/pengadilan dan anak-anak yang

²² Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal 247

²³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 150

dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah, karena di dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Jadi, pada dasarnya hakekat dari pendaftaran/pencatatan perkawinan itu antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga
- b. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara
- c. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif
- d. Agar nilai-nilai dan norma-norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan
- e. Mendapat perlindungan hukum, misalnya apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apabila pernikahan yang dilakukannya tidak tercatat, maka jika isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena si isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi

- f. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan. Dengan adanya akta nikah, maka akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya
- g. Terjamin keamanannya. Suatu pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dulu
- h. Dengan pendaftaran/pencatatan perkawinan, maka akan terwujud kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat, serta mencegah munculnya fitnah.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, ketentuan mengenai sahnya perkawinan ditentukan di dalam Pasal 3 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal ini tidak mengubah ketentuan mengenai sahnya perkawinan di dalam Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 RUU ini hanya menguatkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Pasal 4 RUU ini dinyatakan bahwa kata “wajib” dalam pasal ini dimaksudkan sebagai kewajiban administrasi. Hal ini juga dirumuskan di dalam Penjelasan Umum alinea kelima huruf a yang menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Undang-Undang ini mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sakinah. Kewajiban hukum pencatatan perkawinan membebankan tugas dan wewenang kepada Pejabat Pencatat Nikah untuk mencatat perkawinan dan mengadministrasikannya dalam Akta Nikah dan Buku Pencatatan Rujuk. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dari aspek administrasi kependudukan, sehingga Akta Nikah merupakan akta autentik dalam sistem administrasi Akta Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang”.

Kedudukan dari pencatatan perkawinan berdasarkan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini adalah sama dengan kedudukan pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) KHI jo Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan

seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Ketentuan inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum, ketika persoalan pencatatan perkawinan ditentukan sebagai keharusan yang mengakibatkan perkawinan menjadi tidak diakui secara hukum jika tidak dicatat dan dikenai sanksi pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan. Pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana ini adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) RUU ini, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD menyatakan tidak setuju dengan ketentuan sanksi pidana nikah sirri dalam Pasal 143 RUU ini. Menurutnya, perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menyatakan bahwa klausul sanksi pidana dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Menurutnya, negara dalam konteks ini harusnya bersifat pasif, hanya melegalkan perkawinan dan tidak ikut menentukan. Kalau aspek ini

dilibatkan negara secara eksentif, maka akan sangat berbahaya, karena akan banyak keterlibatan negara yang mengkriminalisasikan mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya.²⁴

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, DRS. ABD. Hakim, M.HI menyatakan bahwa yang menentukan sah tidaknya perkawinan ada pada akad nikahnya, bukan dokumennya. Suatu perkawinan baru bisa disahkan kalau sudah memenuhi standar akad. Kemudian diperintahkan untuk dicatatkan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini KUA hanya berwenang mengawasi pelaksanaan nikah dan mencatat pernikahan, bukan penentu sah atau tidaknya pernikahan.²⁵

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini bersumber dari Buku I KHI tentang perkawinan. Pasal 6 KHI menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat(2): Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan ini dirumuskan kembali di dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal

²⁴ www.primaironline.com, *Pidana Kawin Siri Bentuk Pelanggaran HAM* oleh Zul Sikumbang, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

²⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, tanggal 13 Oktober 2011

1 alinea keempat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menyatakan bahwa “ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 pasal 3 Undang-Undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan, akibatnya sekali-kali bukan bahwa nikah talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu”. Jadi menurut Undang-Undang ini, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mengakibatkan perkawinan itu menjadi batal, dalam arti perkawinan itu tetap sah.

Selain di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan pencatatan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, di dalam BAB II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan perkawinan menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa :

- Ayat(1) : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- Ayat(2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- Ayat(3) : Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- Ayat(4) : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

Hukuman yang diberikan terhadap penduduk yang melanggar ketentuan di atas, dinyatakan di dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang berbunyi :

Ayat(1) : Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal: a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal 32 ayat (1) atau pasal 33 ayat (1), b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (4).

Ayat(2) : Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas, setiap penduduk yang beragama Islam di Indonesia, jika tidak melaporkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan dalam 60 hari sejak tanggal perkawinan berlangsung, dapat dijatuhi hukuman administrasi berupa denda paling banyak Rp 1.000.000, bukan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara, tetapi hukuman administratif.

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak/belum didaftarkan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.²⁶

²⁶ Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hal 295

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan seharusnya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jangan sampai keberadaannya mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia. Dalam Pembukaan UUD 1945, Negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya. Ketentuan sanksi pidana ini harus disesuaikan dengan ketentuan konstitusi, yaitu Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) yang mencerminkan keadilan, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dalam hal perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) yang memperhatikan keragaman penduduk dan agama.

Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Asas keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) diatas mencerminkan perlindungan keadilan menurut undang-undang dan di hadapan undang-undang yang juga mencakup bidang perkawinan. Tujuan hukum yang dapat mengakomodir aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan pada akhirnya harus diselenggarakan berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 28E UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Ayat (1) : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Ayat (2) : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) ini merupakan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam hal kemajemukan dan keragaman agama dan keyakinan, yang dalam hukum perkawinan dikonkretkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Efektifitas dari ancaman sanksi pidana perkawinan tidak dicatat dalam Rancangan Undang-Undang ini tergantung kepada praktek atau pelaksanaannya. Kalau belum ada prakteknya, peraturan tersebut belum bisa dikatakan efektif atau tidak. Apabila Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini disahkan, maka tempat terpidana menjalani hukumannya harus diarahkan. Terpidana ditempatkan dalam sebuah lembaga diklat, karena jika digabung dengan terpidana lain seperti perampok ataupun pembunuh,

dikhawatirkan kejahatan malah akan bertambah. Jadi efektifitasnya ditentukan berdasarkan pelaksanaannya seperti apa.²⁷

Sanksi pidana dalam hukum perkawinan adalah hukuman yang akan diterima oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum perkawinan. Sebelum adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang mengatur sanksi pidana perkawinan, hukuman terhadap orang yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menentukan bahwa barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50 (lima puluh rupiah). Dalam Undang-Undang ini orang yang dapat dikenakan hukuman denda hanya suami. Hal ini terlihat dalam pernyataan pasal tersebut, yaitu “barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan (suami)”. Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat 2 pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100 (seratus rupiah).

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda

²⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, tanggal 13 Oktober 2011

setinggi-tingginya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan adalah pihak mempelai, yaitu suami dan istri. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pelanggaran. Namun, sanksi pidana dimaksud termasuk delik aduan, yaitu orang yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu mengadu ke aparat yang berwenang, yang kemudian diproses melalui sidang di pengadilan sehingga menghasilkan putusan untuk menghukum tergugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang merasa dirugikan maka sanksi pidana tidak mungkin dijatuhkan kepada yang melakukan perkawinan dimaksud.²⁸

Penjatuhan denda sebesar Rp 50, Rp 100 dan Rp 7.500 dalam kondisi perekonomian saat ini memang sudah tidak memiliki arti ekonomi lagi. Sehingga perlu penyesuaian dengan tingkat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 74K/Sip/1969 bahwa penilaian uang harus dilakukan dengan menggunakan harga emas.²⁹

Kemudian berdasarkan Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, hukuman terhadap orang yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan mengalami perubahan. Pasal 143 RUU menentukan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 95

²⁹ www.hukum.kompasiana.com, *Ancaman Pidana Pelaku Nikah Sirih di Indonesia oleh Mukhtar Alshodiq*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.

Dari ketentuan Pasal 143 diatas, dapat ditafsirkan bahwa yang menjadi subjek hukum atau pelaku pelanggar hukum pencatatan perkawinan adalah semua orang yang terlibat dalam perkawinan ketika akad nikah berlangsung. Kalimat “setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan“ dapat ditafsirkan lebih luas, yaitu meliputi semua pihak yang terlibat ketika perkawinan berlangsung dan pelaku akad yang menurut hukum Islam, yaitu suami (mempelai laki-laki), istri (mempelai perempuan), wali nikah mempelai perempuan, saksi-saksi dan penghulu nikah setempat.³⁰

Ketentuan Pasal 143 ini tidak bisa dipisahkan dari ketentuan Pasal 149 RUU. Karena dalam perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatat, yang bertindak sebagai orang yang melakukan penyelenggaraan akad nikah ketika akad nikah berlangsung adalah penghulu nikah setempat yang dipercaya masyarakat untuk melangsungkan akad nikah, bukan Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ini, penghulu tersebut termasuk pelaku pelanggar pencatatan perkawinan.

Ketentuan Pasal 149 tersebut menentukan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

³⁰ Neng Djubaidah, Op.Cit., hal 356

Dalam kaitannya dengan nikah sirri yang dilakukan karena alasan poligami, hal ini sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana perkawinan poligami pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana pelanggaran terhadap kedudukan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana poligami ini diatur dalam Pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal usul pernikahan. Perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ayat (2) : Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam KUHP Belanda, tindak pidana ini dinamakan *dubble huwelijk* atau bigami, karena di negeri Belanda diantara seluruh warganya dianut prinsip monogami, maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan adanya 2 perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai dua, tiga atau empat istri. Maka diantara mereka seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana dari Pasal

279 KUHP ini apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah empat kali melakukan perkawinan secara sah. Terkait dengan status perkawinannya, apabila perkawinan poligami yang dilakukannya telah tercatat, maka pernikahannya itu dapat dinyatakan sah secara hukum. Namun, apabila perkawinan poligami yang dilakukannya tidak dicatatkan di KUA (nikah sirri), maka pernikahan itu tidak sah secara hukum. Terhadap suatu pernikahan yang telah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan kedua pelaku dinyatakan sah, karena yang diputus oleh hakim hanyalah terhadap perbuatan yang telah didakwakan dalam Pasal 279 KUHP.

Mengenai pidana denda dan hukuman kurungan yang diberikan kepada para pelanggar pencatatan perkawinan akan membawa dampak buruk terhadap anak hasil nikah sirri. Apabila sanksi tersebut dijatuhkan kepada ayah atau ibunya, maka hal ini akan berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologi anak. Jika ayah atau ibunya dikenai hukuman, maka siapa yang akan memelihara anak dan menafkahnya. Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan Pasal 143 ini.

Pasal 151 RUU membedakan antara tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) dalam Pasal 151 RUU termasuk jenis tindak pidana pelanggaran. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini termasuk ke dalam pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 530 KUHPidana.

Dalam Pasal 530 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, maka diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Oleh karena itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda ini, ada pemisahan antara istilah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Jika jenis tindak pidana ini dihubungkan dengan perkembangan ilmu hukum pidana saat ini, maka dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditentukan lagi adanya perbedaan tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana kejahatan, kedua-duanya disebut tindak pidana. Di dalam penjelasan buku kesatu Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa alasan penghapusan pembedaan tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran adalah bahwa pembedaan antara kejahatan sebagai “rechtsdelict” dan pelanggaran sebagai “wetsdelict” ternyata tidak dapat dipertahankan, karena ada beberapa “rechtsdelict” yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran (wetsdelict) dan sebaliknya ada pelanggaran yang kemudian dapat dijadikan kejahatan (rechtsdelict) hanya karena diperberat ancaman pidananya.

Dalam tindak pidana perkawinan sirri ini, penindakannya didasarkan pada laporan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan setelah melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 153 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“Kepolisian dan Kejaksaan Negeri melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana tersebut dalam Pasal 141

sampai Pasal 148 setelah menerima laporan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan”.

Jadi, jenis delik tindak pidana perkawinan tidak dicatat berdasarkan Pasal 6 ayat (4) juncto Pasal 143 juncto Pasal 153 Rancangan Undang-Undang tersebut termasuk delik umum atau delik biasa, bukan delik aduan, karena yang dimaksud dengan masyarakat adalah sangat luas. Jadi, siapa saja anggota masyarakat yang mengetahui, mendengar, melihat atau menyaksikan adanya perkawinan tidak dicatat atau adanya tindak pidana terhadap perkawinan dapat mengadukan atau melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang (Kepolisian).³¹

Apabila dalam perkawinan tidak dicatat atau perkawinan sirri yang mereka lakukan tidak mendatangkan kerugian terhadap suami, istri, anak atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkawinan tersebut, maka tidak perlu dituntut pidana. Jika perkawinan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada yang merasa dirugikan, maka tidak ada yang bisa disalahkan dalam perkawinan tersebut dan tidak perlu ada jerat pidana. Walaupun memang pelaku perkawinan sirri ini telah melanggar ketentuan administratif pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan ini adalah sanksi administratif, seperti di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun, ketentuan besaran dendanya harus direvisi sehingga sesuai dengan

³¹ Ibid, hal 236 dan 368

kondisi perekonomian saat ini, karena berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung yang telah dijelaskan diatas, bahwa penilaian uang harus dilakukan dengan menggunakan harga emas.

Hukuman pidana bukan merupakan solusi utama dalam menyelesaikan masalah-masalah akibat ekses yang ditimbulkan dari nikah sirri, sebab memperberat suatu hukuman tidak ada korelasinya dengan penurunan tingkat kejahatan. Karena faktor-faktor utama yang melatarbelakangi masalah ini tidak akan hilang hanya dengan adanya hukuman pidana. Sesuai dengan prinsip tujuan hukum pidana neo klasik yang berorientasi pada pelaku dan perbuatannya, tidak adil jika pihak istri yang sering menjadi korban dikenai hukuman pidana. Berlakukan hukuman perdata ataupun administratif saja bagi pelaku nikah sirri. Pemerintah dapat memberikan konsekuensi perdata, yakni tidak memenuhi hak keperdataan bagi pelaku nikah sirri dengan mempersulit penerbitan buku nikah yang bersangkutan atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan tidak tercatat dalam administrasi negara, dalam hal ini KUA.

Sanksi pidana ini juga tidak perlu, karena tidak disertai dengan pembatalan perkawinan. RUU ini hanya menyatakan bahwa perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Apabila perkawinan dilakukan tidak dihadapan dan tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka pelakunya akan dikenai sanksi pidana denda dan hukuman kurungan, tanpa pembatalan perkawinan. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah sah menurut agama, tetapi jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan itu

merupakan pelanggaran dan karenanya dapat dikenai sanksi tanpa membatalkan perkawinan tersebut.

Pada akhirnya, yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tidak dicatat ini adalah dengan mensahkan perkawinannya melalui itsbat nikah. Itsbat nikah ini merupakan solusi pembenahan terhadap perkawinan yang tidak dicatat, yang sudah terlanjur terjadi di dalam masyarakat. Itsbat nikah yang diajukan karena perkawinan tidak dicatat ini bisa diitsbatkan di Pengadilan Agama. Dalam itsbat nikah ini sudah termasuk mengenai pengesahan anak. Dalam itsbat nikah ini, semakin banyak dokumen yang diajukan oleh pemohon, maka semakin mudah pembuktiannya. Pada dasarnya, biaya dari perkawinan tidak dicatat ini lebih mahal dibandingkan perkawinan yang sah. Karena untuk mengurus itsbat nikah ini saja memerlukan biaya, mulai dari biaya perangko, biaya pengurusan surat, biaya pemanggilan saksi, dan masih banyak biaya lainnya yang diperlukan. Namun, bagi mereka yang tidak mampu memang ada keringanan tanpa perlu membayar.³²

Menurut Rancangan Undang-Undang ini, akta nikah merupakan alat bukti yang bisa dijadikan kekuatan pembuktian terhadap perkawinan yang mereka lakukan. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 6 RUU.

³² Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, tanggal 13 Oktober 2011

Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama

Bidang Perkawinan menentukan bahwa :

- Ayat (1) : “Perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah”.
- Ayat (2) : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan”.
- Ayat (3) : “Permohonan itsbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dengan alasan hilangnya Akta Nikah dan Kutipannya”.
- Ayat (4) : “Perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah dapat diitsbatkan dengan dikenai sanksi pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
- Ayat (5) : “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Buku I KHI tentang Hukum Perkawinan juga mengatur mengenai itsbat nikah. Akan tetapi ketentuan pengajuan permohonan itsbat nikah tidak sama dengan RUU ini. Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah hanya terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya Akta Nikah, dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, Pasal 7 KHI tidak memberikan peluang itsbat nikah dalam hal perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah atau nikah sirri.

Akan tetapi, untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, pelaku perkawinan tidak dicatat atau pelaku perkawinan sirri ini harus dikenai sanksi pidana terlebih dahulu. Sanksi pidana yang dimaksud adalah pidana denda dan

hukuman kurungan berdasarkan Pasal 143 RUU. Setelah pasangan nikah sirri tersebut mendapat sanksi, barulah perkawinan tersebut bisa diisbatkan. Akibat hukum isbat nikah ini terhadap perkawinan sirri adalah perkawinan menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatat ini berakibat anak menjadi anak sah di mata hukum yang berkedudukan hukum yang kuat.

C. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Dicapatatkan Terhadap Istri Dan Anak yang Dilahirkan.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris, dan sebagainya. Dalam kasus nikah sirri ini, akan muncul persoalan yang berdampak terhadap kedudukan isteri dan harta kekayaannya apalagi lebih rumit lagi bila terjadi perceraian. Yang tidak kalah pentingnya ialah ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.³³

Banyak dampak negatif yang akan diterima oleh si istri dan anak-anak hasil dari perkawinan sirri ini. Kawin sirri dinilai menimbulkan efek pengabaian hak-hak hukum dikemudian hari, baik terhadap istri maupun anak yang

³³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hal 93

dilahirkan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi suami untuk mengabaikan istri dan anak-anaknya serta lari dari tanggungjawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

1. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Istri

Perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) membawa kemudharatan secara sosial, karena tidak mempunyai akta perkawinan, maka status perkawinan tersebut melemahkan posisi kaum wanita jika suatu waktu terjadi persengketaan rumah tangga. Ketika terjadi persengketaan dan perselisihan dikemudian hari, perempuanlah yang menanggung beban moral, fisik, maupun psikhis lebih berat, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti formal sebagai seorang istri.

Membahas tentang pernikahan sirri, maka akan berujung pada penjelasan mengenai akibat dari pernikahan itu sendiri. Dimana secara tegas dan jelas menyatakan tidak adanya kepastian hukum atas status serta hak si istri. Ini karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum negara, meskipun secara agama dianggap sah. Oleh karenanya, istri tidak mempunyai hak dalam hal perlindungan hukum atas perkawinan yang dijalaninya. Hak dan kewajiban suami istri, seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta di dalam Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam baru bisa

dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah berakibat suami atau istri tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnyanya perkawinan. Perkawinan yang tidak memiliki bukti autentik tersebut menyebabkan suami atau istri tidak memperoleh perlindungan hukum dalam hal gugat menggugat di Pengadilan seperti gugatan perceraian, pembagian harta bersama, nafkah, waris mewaris atau untuk kepentingan lainnya.

Perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akan mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan yang sah. Dengan suatu akta perkawinan, seseorang dalam hal ini adalah istri dapat menunjukkan bahwa dirinya dengan orang tertentu yang tersebut dalam akta perkawinan itu terikat sebagai suami isteri yang sah. Seorang janda yang menagih uang pensiun suaminya, dapat menunjukkan akta perkawinan untuk membuktikan bahwa dirinya memang benar isteri (janda) dari seorang suami yang telah meninggal dunia.

Secara hukum, isteri sirri tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan hubungan hukum antara isteri sirri dengan suaminya. Karena itu isteri tidak berhak atas nafkah dan hak waris dari suami jika ia meninggal dunia, baik itu harta hibah yang menjadi harta bersama maupun harta yang berasal dari benda-benda bergerak lainnya. Isteri tidak berhak atas

harta gono gini jika terjadi perceraian. Istri akan sulit menuntut hak-haknya yang seharusnya didapat sebagai akibat terjadinya perceraian, karena oleh negara perkawinannya dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi. Demikian pula perempuan yang bersuamikan pegawai negeri sipil (PNS). Jika perkawinannya tidak dicatatkan, maka ia dan anak-anaknya tak akan mendapatkan tunjangan istri, hak pensiun dan hak lain yang semestinya diterima dari suaminya.

Dampak negatif lain dari pernikahan sirri adalah akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi. Nikah sirri seringkali dijadikan suatu jalan pintas seseorang untuk berpoligami. Dalam kasus poligami ini, istri pertama dan istri sirri (kedua, ketiga, dan seterusnya) sama-sama mengalami penderitaan psikologis dan bahkan kekerasan fisik. Istri pertama, misalnya merasa kecewa dan sakit hati kepada suaminya atas kebohongan dan ketidakjujurannya mengawini perempuan lain. Implikasi selanjutnya adalah kepercayaannya terhadap suami mulai pudar. Dampak lain dari nikah sirri untuk istri pertama adalah terjadinya kekerasan fisik, didalangi oleh suami atau istri sirrinya (kedua, ketiga, dan seterusnya). Ada kasus, suami kadangkala sudah mulai ringan tangan terhadap isterinya setelah memiliki istri sirri.³⁴

Pada nikah yang tidak dicatat (nikah sirri) ini, pasangan suami istri bisa gampang bercerai karena pertengkaran kecil. Sementara, nikah yang tercatat relatif tak semudah itu untuk bercerai. Dalam pernikahan yang sah, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan melalui prosedur yang telah

³⁴ www.metronews.fajar.com, *Nikah Siri dan Keterpurukan Perempuan oleh Mappinawang*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

ditetapkan. Pengadilan akan menetapkan kuasa asuh anak, kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang ditanggung oleh ayah dan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sementara dalam pernikahan sirri, isteri akan kehilangan hak-haknya tersebut, karena isteri tidak dapat menggugat ke Pengadilan. Banyak pengaduan yang masuk ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tentang perebutan kuasa asuh anak yang lahir dari perkawinan sirri.³⁵ Selain itu, status hukum yang tidak jelas juga akan menyulitkan posisi mantan isteri untuk menikah lagi karena tidak adanya akta nikah atau cerai.

Akibat hukum lainnya adalah apabila terjadi kekerasan fisik, psikhis, seksual, dan ekonomi terhadap isteri dan anak, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak dapat digunakan. Dalam kasus nikah sirri, bila terjadi KDRT maka akan sulit untuk mengukurnya apakah perbuatan tersebut termasuk KDRT atau tergolong penganiayaan yang hanya dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan KUHP Pasal 351-358, yang tentunya hukumannya lebih ringan dibandingkan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU PKDRT ini mensyaratkan adanya bukti autentik yang menunjukkan relasi suami isteri, yaitu surat nikah resmi yang dikeluarkan Catatan Sipil ataupun dari Kantor Urusan Agama (KUA). Akan

³⁵ www.lbh-apik.com, *Catatan Tahunan 2009 oleh lbh apik Jakarta*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

tetapi, dalam hal ini isteri sirri tidak mempunyai status atau bukti hukum yang jelas dari perkawinannya, sehingga isteri sirri tidak mempunyai alasan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban dan meminta pertolongan dari lembaga yang berwenang.

Akan tetapi, mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pelaku nikah sirri ini tergantung kepada kepercayaan dan keyakinan hakim. Jika hakim percaya dan merasa yakin bahwa perbuatan tersebut tergolong dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, jika hakim tidak mempercayai bahwa perbuatan tersebut tergolong ke dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka hakim menyatakan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan.³⁶

2. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Anak

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Anak sah menurut fiqh adalah anak yang dilahirkan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, tanggal 13 Oktober 2011

sekurang-kurangnya dalam 6 bulan sesudah nikah atau 4 bulan 10 hari sesudah kematian suami. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Aturan dan pemahaman mengenai anak sah dalam hukum Islam ini berbeda dengan aturan dalam hukum perkawinan Indonesia. Dalam hukum perkawinan Indonesia, baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan.

Nikah sirri tidak melindungi hak-hak hukum anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Salah satu hak anak tersebut adalah hak anak atas akte kelahiran. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pada umumnya, kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk yang bersangkutan sendiri. Dengan pencatatan kelahiran tersebut dalam bentuk akte kelahiran, maka yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran seseorang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mensyaratkan bahwa pengajuan akte kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Sementara pernikahan siri ini tidak tercatat secara resmi di pencatatan perkawinan, sehingga tidak memiliki dokumen resmi berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Imbasnya anak tidak memiliki akte kelahiran. Padahal tanpa akte kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan KTP, paspor, dan mendaftar sekolah, karena untuk mendaftar sekolah perlu adanya akte kelahiran untuk kepastian umur untuk sekolah. Saat ini semua sekolah mensyaratkan adanya akte kelahiran untuk masuk sekolah.

Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akte kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja, dan kekerasan.³⁷

Akte kelahiran hanya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam pernikahan sirri, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak diluar nikah. Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa anak

³⁷ www.kpai.go.id, *Anak dan Akta Kelahiran*, (diakses tanggal 10 Agustus 2011)

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, begitu juga di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Konsekuensi dari nikah sirri ini adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Maka Departemen Dalam Negeri serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal ini memberikan alternatif. Bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan sirri tanpa dokumen maka dianggap sebagai anak dari orang tua tunggal (ibu), karena dalam akte kelahiran tersebut yang dicantumkan hanya nama ibu yang melahirkannya. Selain itu, diberikan juga catatan pinggir bagian kiri “anak diluar nikah”, karena statusnya dianggap sebagai anak luar nikah.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan membedakan kedudukan seorang anak dalam hubungannya dengan perkawinan orang tuanya, begitu juga dengan Pasal 94 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama. Secara biologis tidak mungkin seorang anak tidak mempunyai ayah, maka demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan sebagainya, untuk menimbulkan hubungan hukum perdata baru antara ayah dan anak dapat dilakukan melalui pengakuan dan pengesahan anak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan pengakuan anak. Akta pengesahan anak adalah semacam pernyataan bahwa anak

tersebut telah disahkan menjadi anak yang sah dalam pengertian hukum perdata.³⁸

Namun, dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan dan pengesahan anak. Pasal 49 ayat (2) memberikan pengecualian bahwa kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Dampak lain dari pernikahan sirri ini secara hukum adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri ini tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Pada praktiknya, karena perkawinannya tidak diakui negara, maka apabila orang tua dari anak tersebut meninggal dunia atau telah bercerai tidak ada kewajiban bagi suami memberikan hak waris bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut, karena dia akan dianggap mengikuti nasab ibunya. Suami bisa dengan mudahnya melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, kecuali ada kesadaran dari suami itu sendiri untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sebaliknya, apabila anak memiliki akta kelahiran, maka anak tersebut dapat membuktikan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris yang sah dari si pewaris.

Hak-hak anak di berbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Akte kelahiran

³⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal 42-43

merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas disebutkan bahwa setiap penelantaran terhadap anak dan seseorang yang sengaja tidak mendaftarkan atau mencatatkan kelahiran anak dalam sistem kependudukan, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud di atas, maka di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan sanksi administratif yang diberikan bagi orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan atau mencatatkan kelahiran anak dalam sistem kependudukan telah dijelaskan dalam sub bab pembahasan sebelumnya.

Namun, adanya deviasi (penyimpangan dari norma atau peraturan yang berlaku) atas praktek-praktek nikah sirri pada beberapa kasus tidak bisa dijadikan alasan pembenaran dan menggeneralisir pemicanaan pelaku nikah sirri dalam Undang-Undang baru. Tidak adil jika kemudian dampak negatif dari pernikahan sirri digeneralisasi terjadi kepada semua pelakunya. Masih banyak keluarga yang dibangun secara baik, bahagia, dan harmonis dari hasil pernikahan sirri. Pernikahan yang tidak dicatatkan ini tetaplah halal, baik dan mulia menurut hukum Islam. Pernikahan yang tercatat sekalipun, baik yang berakhir perceraian maupun bukan, juga sering mengorbankan anak-anak dan perempuan. Khususnya manakala hak-hak mereka juga tidak bisa terlindungi.

D. Beberapa Contoh Kasus Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Perkawinan Sirri)

Beberapa contoh kasus perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) ini diperoleh penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pasangan yang melakukan perkawinan sirri di beberapa tempat di Kota Padang, Sumatera Barat. Dari beberapa responden yang penulis temui, tidak semuanya bersedia memberikan keterangan secara jelas dan lengkap. Responden terkesan seolah ingin menutupi perkawinan sirri mereka. Dari beberapa responden yang ditemui, ada 4 responden yang peneliti anggap cukup memberikan data bagi penelitian ini.

- Kasus nikah sirri yang pertama adalah pernikahan sirri yang dilakukan oleh Lina (35) dan Dani (37). Pasangan ini memilih untuk menikah sirri

karena hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua dari pihak perempuan. Ketika Lina ingin menikah dengan Dani, orang tua Lina menentang keras niat Lina tersebut. Sampai akhirnya Lina memutuskan untuk pergi dari rumah. Lina meminta Dani untuk menyembunyikan dirinya agar orang tuanya tidak mengetahui keberadaannya. Orang tua Lina terus berusaha mencari anaknya sampai kerumah Dani dengan mengancam untuk melaporkan Dani ke polisi apabila tidak segera memulangkan Lina. Walaupun Lina berlatar belakang pendidikan tinggi, Lina tetap memilih menikah sirri. Lina mengakui bahwa ketika ia memilih untuk menikah sirri, ia tidak menyadari konsekuensi hukum yang akan diterima olehnya dan anaknya. Saat itu yang ada di pikiran Lina adalah bagaimana dia bisa menjalani hubungan yang sah secara agama dengan Dani. Sebelumnya Lina bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang, yang kemudian ia lebih memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Akhirnya ibu Dani terpaksa menikahkan mereka berdua. Ibu Dani khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan, mereka akan terjerumus dalam perbuatan zina. Ibunya akhirnya membawa Lina dan Dani ke Bangkinang, Propinsi Riau di tempat ipar dari ibunya Dani untuk dinikahkan. Akhirnya Dani dan Lina menikah dan yang menjadi wali Lina adalah ipar dari pihak ibu Dani, yang menjadi saksi adalah saudara dari ipar ibunya Dani, sedangkan yang menikahkan mereka adalah penghulu yang tinggal disekitar rumahnya. Saat ini Dani dan Lina tinggal di daerah Padang Sarai. Setelah 12 tahun

menikah, Dani dan Lina memiliki 3 orang anak. Masalah yang dihadapi Dani dan Lina saat ini adalah mereka tidak bisa membuat akte kelahiran anaknya, karena mereka tidak memiliki akta nikah. Sementara anak-anaknya butuh akte kelahiran sebagai persyaratan untuk masuk sekolah. Anaknya yang pertama saat ini kelas 6 SD, yang kedua kelas 1 SD, dan yang ketiga masih balita. Untuk mendaftarkan sekolah anaknya, Lina menggunakan surat keterangan kelahiran dari bidan tempat ia melahirkan. Anaknya yang pertama sebentar lagi akan masuk SMP dan butuh akte kelahiran yang asli untuk pendaftaran masuk sekolah.

- Kasus berikutnya adalah pernikahan sirri yang dilakukan oleh Toni (49) dan Desi (47). Dalam kasus ini, status Desi adalah sebagai isteri kedua. Toni dan Desi menikah tanpa sepengetahuan isteri pertama Toni. Toni menikah dengan isteri pertamanya (Widya) karena dijodohkan oleh orang tua Toni. Namun, sebelumnya Toni telah menjalin hubungan dengan Desi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah sirri. Toni memiliki 4 orang anak dari pernikahannya dengan Widya dan 1 orang anak dari pernikahannya dengan Desi. Setelah 13 tahun menikah, isteri pertama Toni, Widya meninggal pada saat proses kelahiran anak ke 5-nya. Akhirnya orang tua Toni mengetahui keberadaan Desi sebagai isteri sirri Toni. Orang tua meminta Toni untuk menceraikan Desi. Namun Toni tidak memenuhi keinginan orang tuanya. Toni membawa Desi tinggal serumah dengan ke 4 anaknya. Orang tua Toni mengancam, kalau Toni tidak segera menceraikan Desi, maka orang tua Toni tidak akan

memberikan biaya untuk modal usahanya. Hal inilah yang membuat Toni merasa bingung, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Toni bergantung kepada kedua orangtuanya. Akhirnya Toni memilih pindah ke Palembang dan menetap dengan ke 4 anaknya disana, sedangkan Desi tetap tinggal di Padang (Lubuk Minturun) bersama anaknya. Walaupun mereka telah berpisah, Toni masih memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan untuk anaknya. Sedangkan Desi bekerja serabutan untuk mencukupi kekurangan nafkah yang diberikan oleh Toni. Sekali dalam sebulan Toni datang untuk melihat anaknya.

- Kasus ketiga adalah kasus yang dialami oleh pasangan nikah sirri Andi (35) dan Ani (32). Ani adalah janda yang memiliki 4 orang anak, anak pertama kelas 6 SD, anak kedua kelas 5 SD, anak ketiga kelas 3 SD, dan anak keempat masih balita. Suami Ani meninggal pada saat terjadinya tsunami di Mentawai. Ani menikah dengan Andi (asal Pariaman), 7 bulan sesudah kematian suaminya. Ani dan Andi tinggal di daerah Duku, Pariaman. Andi dan Ani memutuskan untuk menikah sirri karena mereka tidak memiliki biaya untuk pengurusan administrasi pernikahan di KUA. Andi hanya bekerja sebagai supir truk pengangkut pasir, yang memiliki penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini ketiga anak Ani dari suami pertamanya dititipkan ke Panti Asuhan PGAI Padang, karena Ani dan Andi tidak memiliki biaya untuk menafkahi dan biaya untuk pendidikan anak-anaknya, apalagi biaya untuk pengurusan administrasi pernikahan yang menurutnya mahal.

Hanya anaknya yang masih balita yang tinggal dengan Ani. Saat penulis mewawancarai Ani dan suaminya, mereka sedang mengumpulkan uang untuk biaya pengurusan nikah di KUA. Karena mereka juga ingin agar pernikahannya sah dan mereka bisa mendapatkan buku nikah.

- Contoh kasus keempat adalah kasus pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan Anton (41) dan Wirna (35). Kasus ini paling rumit dibanding 3 kasus sebelumnya. Anton dan Wirna melakukan nikah sirri karena orang tua Anton tidak menyetujui hubungannya dengan Wirna, karena Wirna seorang janda yang memiliki 1 orang anak. Keluarga pihak Anton akhirnya menyetujui pernikahan mereka setelah mereka memiliki anak, walaupun keluarga Anton tidak sepenuhnya mendukung. Anton dan Wirna memiliki 2 orang anak. Anak pertama berumur 7 tahun dan anak keduanya berumur 5 tahun. Selama beberapa tahun pernikahannya tidak terjadi masalah dalam rumah tangganya. Sampai ketika Anton mengalami kecelakaan, terjadi konflik di dalam rumah tangganya. Anton menderita cacat karena kecelakaan yang dialaminya. Ketika itu, Anton mendapat uang asuransi dari perusahaan asuransi yang lumayan besar. Karena suaminya telah cacat, sehingga Anton tidak bisa mencari nafkah lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, maka Wirna memilih berpisah dengan Anton. Wirna pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami dan keluarga suaminya. Wirna membawa seluruh uang asuransi, sertifikat kepemilikan tanah atas nama Anton dan membawa anak-anaknya kembali ke kampung di daerah transmigrasi di

Pasaman. Istrinya bisa meninggalkan suaminya begitu saja karena mereka tidak memiliki surat-surat nikah. Suaminya pun tidak bisa menemui istrinya ke kampungnya karena kondisinya yang cacat. Padahal saat ini Anton mengaku sangat ingin bertemu dengan kedua orang anaknya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan sekedar merupakan perbuatan keagamaan, tetapi juga merupakan perbuatan hukum. Perkawinan tidak hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi perkawinan harus dicatatkan secara resmi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menyatakan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah. Tujuannya adalah agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan menjamin kepastian hukum di bidang perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memiliki sebuah dokumen resmi berupa akta nikah yang merupakan bukti otentik atas perkawinan yang mereka lakukan. Dokumen resmi ini bisa dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan.
2. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan sirri merupakan perbuatan ilegal. Pasal 143 RUU ini menyatakan bahwa pelaku pelanggaran

hukum pencatatan perkawinan akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000 atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan. Selain itu, sanksi juga berlaku bagi penghulu yang menikahkannya, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tergolong tindak pidana pelanggaran. Menurut RUU ini, perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah atau pernikahan sirri dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, pelaku perkawinan tidak dicatat harus dikenai sanksi pidana terlebih dahulu, yaitu pidana denda dan hukuman kurungan berdasarkan Pasal 143 RUU. Sebelumnya sanksi administratif pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah adalah segala hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sehingga perkawinannya tidak mendapat perlindungan secara hukum. Akibat hukumnya, istri bukan merupakan istri sah. Oleh karenanya istri tidak berhak atas nafkah dan hak waris dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu istri juga tidak berhak atas harta bersama atau hak-hak lain sebagai istri jika terjadi perceraian, karena perkawinannya tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik di Pengadilan atas perkawinan yang mereka lakukan. Sedangkan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap

anak yang dilahirkan adalah status anak tersebut menjadi anak tidak sah atau anak diluar nikah, karenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam akte kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibu yang melahirkannya. Selain itu, secara hukum anak tersebut tidak berhak atas biaya hidup, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan ini, maka pemerintah ataupun aparat KUA dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam usaha mengurangi jumlah praktek perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan sirri. Pemerintah dapat mensosialisasikan, memberikan advokasi dan penyadaran mengenai betapa pentingnya pencatatan dalam pernikahan sebagai payung hukum dalam jaminan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus nikah sirri ini, kebanyakan dari pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan tersebut dan akibat hukum yang akan diterima apabila perkawinan mereka tidak dicatatkan secara resmi. Oleh karenanya, pemerintah dapat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya kepada

masyarakat di daerah perkampungan yang paling banyak terjadi kasus nikah sirri ini.

2. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan sirri merupakan pelanggaran terhadap administrasi perkawinan. Maka, sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap pelaku pelanggar pencatatan perkawinan adalah sanksi administratif berupa pemberian denda seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau dengan memberikan sanksi perdata, bukannya pidana denda atau pidana penjara di dalam RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Namun, karena besaran dendanya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, pemerintah dapat merevisi undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini dan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan.
3. Hukuman pidana denda dan pidana penjara bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan bukan merupakan solusi utama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama dan keyakinannya, yang jelas dijamin oleh UUD 1945. Pemerintah harus lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang telah ada, agar peraturan tersebut dapat melindungi berbagai kepentingan masyarakat di bidang perkawinan. Karena

berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, alasan dari pasangan suami istri ini melakukan nikah sirri salah satunya adalah karena biaya pendaftaran administrasi pernikahan yang bagi mereka terlalu mahal. Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan dalam pelayanan administrasi pernikahan. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah akses pernikahan yang dicatatkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramulyo, M. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shomad, Abd., 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Summa, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahr, Saidus, 1976, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung.

Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo, 1987, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.



Perihal : Tugas Survey/penelitian

Nomor : 1712/H.16.4/PP-2011
Lamp. :

Padang, 9 Agustus 2011

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabisd.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama
No. BP

Fakultas

Jurusan

Program Khususan

Alamat

Pembimbing I

Pembimbing II

Untuk Melaksanakan

Waktu

Tempat Penelitian

Dalam Rangka

J u d u l

: Nadia Andhita

: 05140241

: Hukum Universitas Andalas

: Ilmu Hukum

: Perdata Kemasyarakatan

: Jl. Kura Raya No. 354 Siteba Padang

: Linda Elmis, SH.,MH

: Dian Amelia, SH.,MH

: Penelitian Lapangan

: 3 Bulan (10 Agustus - 10 November 2011)

: Padang, Sumatera Barat

: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi

: Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-Undang Materi

: Peradilan Agama Mengenal Sanksi Pidana Bagi Pelaku

Nikah Siri

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga menghargakan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebetulnya kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan,

Perbantu Dekan I,
Yosewan, SH.,MH,LLM

NIP. 1962 1231 1989 0110 02

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal



Nomor : 1712/H.16.4/PP-2011

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 9 Agustus 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan Pengadilan Agama Padang
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama	: Nadia Andhita
No. BP	: 05140241
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Kemasyarakatan
Alamat	: Jl. Kurao Raya No. 354 Siteba Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (10 Agustus - 10 November 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Tinjauan Yuridis Rancangan Undang-Undang Materi Peradilan Agama Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH., MH., LLM
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.17.14/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Pembantu Dekan I.Fakultas Hukum UNAND
Nomor : 1712/H.16.4/PP-2011 tanggal 9 Agustus 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 6 Oktober 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: NADIA ANDHITA
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang.14 Agustus 1987
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di Padang	: Jln.Kurao Raya No.254 Siteba Padang
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Tinjauan Yuridis Rancangan Undang Undang Materi Peradilan Agama mengenai sanksi Pidana bagi pelaku Nikah Siri
Waktu/Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: Pengadilan Agama Padang,Pengadilan Negeri kelas I A Padang
Anggota Rombongan	: -

ngan ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 6 Oktober 2011

An KEPALA

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS BANGSA



ruskan Kepada Yth,
etuaPengadilan Agama Padang
etuaPengadilan Negeri Klas I A Padang
mbantu Dekan I Fakultas Hukum.UNAND
ng bersangkutan
rtinggal



PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

Jl. Durian Tarung No. 1 Simpang By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang
Telp. (0751) 775436; Facsimile : Telp. (0751) 775436; www.pa-padang.pta-padang.net.

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-A1/155/TL.00/I/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A menerangkan :

Nama : NADIA ANDHITA
Nomor NIM : 05140241
Pekerjaan : Mahasiswi
Pogram Kekhususan : Perdata Kemasyarakatan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor : 1712/H.16.4/PP-2011 tanggal 09 Agustus 2011 dan Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang Nomor : 070.17.14/Kesbang.Pol/2011 tanggal 06 Oktober 2011, bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d 06 Januari 2012, dengan judul Skripsi "TINJAUAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG MATERI PERADILAN AGAMA MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU NIKAH SIRI".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam,

Padang, 09 Januari 2012

Ketua,

Dra. Hj. ERMIATI. N

NIP. 194808241967122003